

Nama : FEBBY KURNIAWAN

NIM : 18523273

Kelas : A

1. terangkan dan beri contohnya kapan seseorang dikatakan:

a.mempunyai status warga negara rangkap :

Bipatride (dwi kewarganegaraan) timbul apabila menurut peraturan dari dua negara terkait seseorang dianggap sebagai warganegara kedua negara itu. Misalnya, Kaido dan Linlin adalah suami isteri yang berstatus warga negara A yang menganut asas ius-sanguinis namun berdomisili di negara B yang menganut asas ius-soli. Kemudian mereka mempunyai anak bernama Yamato, menurut negara A, Yamato adalah warga negaranya karena mengikuti kewarganegaraan orangtuanya. Sedangkan menurut negara B, Yamato juga warga negaranya karena tempat kelahirannya adalah negara B. Maka anak tersebut mempunyai status dua kewarganegaraan

b.tidak mempunyai status warga negara :

Apatride (tanpa kewarganegaraan) timbul apabila menurut peraturan Kewarganegaraan, seseorang tidak diakui sebagai warganegara dari negara manapun. Misalnya, Garp dan Ddan adalah suami isteri yang berstatus warganegara B yang berasas ius-soli tetapi berdomisili di negara A yang berasas ius-sanguinis. Kemudian mereka mempunyai anak bernama Dragon. Menurut negara A, Dragon tidak diakui sebagai warga negaranya, karena orang tuanya bukan warga negaranya. Begitu pula menurut negara B, Dragon tidak diakui sebagai warga negaranya karena lahir di wilayah negara lain. Maka anak tersebut tidak memiliki Kewarganegaraan

2. jelaskan hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, dan negara terhadap warganegara, kaitanya dengan kasus covid 19 akhir akhir ini.

Pada masa Pandemi Covid 19, warga negara mempunyai kewajiban untuk patuh terhadap aturan dari negara yang telah ditentukan agar masa pandemi segera berakhir. Warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang layak dari negara dalam masa pandemic. Untuk negara, mempunyai kewajiban untuk memperlakukan aturan seperti stay at home yang nantinya akan membantu warga negara untuk mencegah covid 19 menyebar dan membuat warga negara merasa aman ketika masa pandemi. Warga negara juga mempunyai hak untuk menentukan kapan masa pandemi berakhir.